



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3478-3486

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Pendapatan, Belanja Rutin dan Akuntabilitas

Roy Budiharjo<sup>1✉</sup>, Ardio Sagita<sup>2</sup>, Sigit Mareta<sup>3</sup>

(1) Universitas Telkom, (3) Universitas Dian Nusantara

Email: [roybudiharjo@telkomuniversity.ac.id](mailto:roybudiharjo@telkomuniversity.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja rutin dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder dikumpulkan dan sebagai populasi adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2021-2023 dan diterbitkan di laman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Daerah/Kota setempat; 2) Mempunyai informasi hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dimana uji parsial menggunakan uji statistik t dan sebelum uji ini dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja rutin berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Belanja Rutin, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah*

### Abstract

The purpose of this study is to analyze the influence of regional revenue, routine expenditure and accountability on the financial performance of the local government of Central Java Province. Secondary data is collected and as a population is the local government of districts and cities in Central Java Province. Sampling in this study uses the purposive sampling method with the following criteria: 1) Regency/City Regional Governments in Central Java Province that prepare Regional Government Financial Statements from 2021-2023 and published on the PPID (Information and Documentation Management Official) page of the local Regional/City Government; 2) Have information on the results of the SAKIP evaluation of Regency/City Governments in Central Java Province in 2021-2023 This study uses multiple linear regression analysis where the partial test uses a statistical test t and before this test is carried out first a classical assumption test. The results of this study show that regional revenue has a significant positive effect on the financial performance of local governments, while routine spending has a significant negative effect on the financial performance of local governments and accountability has no effect on the financial performance of local governments.

*Keywords: Accountability, Routine Expenditure, Local Government Financial Performance, Local government Revenue*

### PENDAHULUAN

Seiring perkembangan reformasi di Indonesia, keadaan pemerintahannya cenderung berubah. Pemerintah mengambilnya ketika Indonesia masih dilanda krisis ekonomi yang mencekik kesejahteraan masyarakat. keputusan tentang penerapan dan pelaksanaan otonomi daerah Indonesia. Pemerintah sedang melakukan perubahan dalam struktur pemerintahannya, beralih dari pemerintahan sentral menjadi desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurut teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), ketika perusahaan publik memisahkan pemilik, pengelola, dan pihak yang berkepentingan, terjadi asimetri informasi antara keduanya. Sebagai prinsipal, rakyat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyesuaikan tujuan mereka dengan tujuan pemerintah. Dengan menerapkan kontrol ini,

rakyat meminta pemerintah untuk melaporkan bagaimana sumber daya yang diberikan kepada pemerintah digunakan. (Badrudin, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 18 PAD adalah pendapatan yang di dapat oleh daerah yang didapat berdasarkan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Halim dan Kusufi (2012) menerangkan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari seluruh pendapatan lokal yang dihasilkan melalui berbagai sumber ekonomi lokal. Penelitian yang telah dilakukan Antari & Sedana (2018) menyatakan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Namun temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Andirfa (2018) dimana Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo selama ini patut dipertanyakan. Pasalnya, berdasarkan rilis Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah 2021 yang disiarkan secara *live* di kanal Youtube Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng belum lama ini, menyebutkan bahwa di provinsi tersebut angka kemiskinannya mengalami peningkatan signifikan. Sebagai informasi, kemiskinan di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal itu Tercatat dalam Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 ditetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Dari 212 kabupaten/kota di Indonesia, 25 provinsi Jateng mencatatkan rekor kenaikan kemiskinan ekstrem dari 5 menjadi 19 daerah (Kedaipena.com, 2022).

Belanja rutin atau lebih dikenal dengan belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memiliki manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. (Mardiasmo, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti & Mimba, 2016) menunjukkan hasil bahwa belanja rutin tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian (Permatasari & Trisnaningih, 2022) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah Berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

disingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revidi serta evaluasi kinerja. Penelitian yang dilaksanakan oleh Gitasih et al, (2023), menyatakan bahwa evaluasi SAKIP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Badung.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul: "Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah: Pendapatan, Belanja Rutin dan Akuntabilitas". Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Daerah Mempengaruhi Kinerja Pemerintahan Daerah?
2. Apakah Belanja Rutin Mempengaruhi Kinerja Pemerintahan Daerah?
3. Apakah Akuntabilitas Mempengaruhi Kinerja Pemerintahan Daerah?.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sejumlah sampel diambil dari populasi eksisting dengan menggunakan teknik purposive random sampling yaitu teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2021-2023 dan diterbitkan di laman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Daerah/Kota setempat;
2. Mempunyai informasi hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023 (melalui laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau mendapatkan langsung dari Pemerintah Daerah/Kota setempat).

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data diperoleh melalui laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, laman Kementerian Dalam Negeri, laman DJPK, serta laman pemerintah daerah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_PEND	105	27,55	29,29	28,4144	0,34605
X2_EXP	105	27,34	29,04	28,2812	0,34023
X3_SAKIP	105	64,00	78,00	67,8000	4,76647
Y_FP	105	0,92	1,28	1,0191	0,05623
Valid N (listwise)	105				

1. Pendapatan Daerah mempunyai nilai rata-rata 28,4144. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 0,34605. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.
2. Belanja Rutin memiliki nilai rata-rata 28,2812. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 0,34023. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja rutin terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.
3. Akuntabilitas pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata 67,8000. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 4,76647. Hal ini menunjukkan bahwa variabel indeks reformasi birokrasi terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai nilai rata-rata 1,0191. Sedangkan nilai simpangan bakunya adalah 0,05623. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah terdistribusi normal, karena nilai deviasi standar lebih kecil dari nilai rata-rata variabel.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R Square memiliki nilai 0,113 sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan variabel independen (pendapatan daerah, belanja rutin dan akuntabilitas) dalam menjelaskan variasi variabel

dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) terbatas namun mendukungnya secara bersama-sama karena mengalami peningkatan. Nilai Adjusted R Square (R<sup>2</sup>) diubah menjadi bentuk persentase, artinya persentase kontribusi ukuran pemerintah daerah, belanja modal, belanja rutin dan indeks reformasi birokrasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 11,30% sedangkan sisanya (100%-11,3% = 89,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji signifikansi simultan (uji F) pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikan untuk variabel dependen.

Sesuai dengan hasil hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa antar variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen, maka diperlukan regresi linier berganda untuk membuat model analisis.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,627	0,526		3,092	0,003
1 PENDING	0,296	0,095	1,821	3,123	0,002
EXP	-0,320	0,097	-1,936	-3,308	0,001
SAKIP	0,001	0,001	0,044	0,424	0,673

a. Dependent Variable: FP

F Test : 0,007

Adjusted R Square : 0,113

Pengaruh Pendapatan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil koefisien regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki t hitung sebesar 3,123 dengan kinerja keuangan daerah sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p (0,002) < tingkat signifikansi (0,05), sehingga H1 berarti berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka kinerja keuangan akan semakin meningkat pula. Pendapatan asli daerah memberikan arti penting bagi daerah karena nantinya akan dapat dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan guna menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan penerimaan

pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan tingginya sumber keuangan daerah. Jika sumber keuangan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmoko dan Khairudin, (2022) yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### Pengaruh belanja rutin terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil koefisien regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa belanja rutin memiliki t count negatif sebesar 3,308 dengan probabilitas sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $p$  (0,001) < tingkat signifikansi (0,05), sehingga H2 berarti belanja rutin berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya realisasi belanja rutin yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial berimplikasi atas kenaikan atau penurunan kinerja pemerintah daerah. Proporsi belanja rutin yang terbesar digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan hak pegawai melalui pembayaran gaji dan tunjangan, yaitu sebesar 60% dari total belanja rutin (berdasarkan statistik deskriptif). Pemenuhan hak pegawai tersebut berhubungan dengan program pembangunan daerah, sehingga realisasi belanja rutin berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Astuti & Mimba, 2016) yang menunjukkan hasil bahwa belanja rutin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

#### Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil koefisien regresi pada tabel 2 menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi memiliki t count negatif sebesar 0,424 dengan probabilitas 0,673. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $p$  (0,673) > tingkat signifikansi (0,05), sehingga H3 berarti bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena rata-rata hasil evaluasi SAKIP yang dicapai pemerintah daerah masih kurang optimal. Sebagian besar dari sampel (berdasarkan statistik deskriptif) memperoleh hasil evaluasi SAKIP di range 60-70. Range nilai tersebut masuk dalam kategori "Baik", yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja tetapi perlu sedikit perbaikan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang berkebalikan antara peningkatan hasil evaluasi SAKIP dengan kinerja pemerintah daerah karena pelaksanaan evaluasi SAKIP hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tidak

memperhatikan manfaat atau outcome. Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB pun berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, belum menilai hubungan sebab akibat dari pelaksanaan SAKIP. Penelitian ini sejalan dengan Kinanti, (2023) yang menyatakan bahwa Evaluasi hasil SAKIP tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Belanja rutin berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Akuntabilitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Doctoral Dissertation, Udayana University).
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. M. (2016). PENGARUH BELANJA RUTIN DAN BELANJA MODAL PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal E-Akuntansi*, 14(3).
- Atmoko, C. A dan Khairudin, 2022. Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 10 (2): 291-296.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360.
- Kedaipena.com. (2022, May 7). *Angka Kemiskinan di Jateng Meningkat, Kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dipertanyakan*.
- Kinanti, N. T, 2023, Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal,

Indeks Reformasi Birokrasi, Dan Hasil Evaluasi Sakip Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2021. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.

Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi

Ni Kadek Yuni Gitasih<sup>1</sup> | Made Sumada<sup>2</sup> | Wayan Astawa, 2023. PENGARUH E-SAKIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. 6 (4).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3).

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah